



PERWAKILAN ACEH



RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023

PERWAKILAN BPKP ACEH



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN ACEH

بادن فعاواسن كأولئمن دان فمبائونن فرواكيلن أحيه

Jalan Tengku Panglima Nyak Makam Banda Aceh 23118
Telepon (0651) 28133, 28134, dan 28183, Faksimile (0651) 28173

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023

Dalam memastikan terwujudnya target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Aceh yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2023, Perwakilan BPKP Aceh telah menyusun rencana aksi kinerja sebagai salah satu sarana pengendalian dalam mencapai tujuan organisasi.

Rencana Aksi Kinerja akan dipedomani oleh seluruh pegawai sebagai:

1. Media untuk membangun komitmen dalam mencapai kinerja yang diharapkan dan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pegawai;
2. Arah kebijakan dan strategi bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja serta sebagai dasar kolaborasi pelaksanaan kegiatan dan sinergi dengan mitra kerja;
3. Sarana untuk monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja.

Rencana aksi telah memperhatikan pencapaian target kinerja pelaksanaan beberapa kegiatan yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan risiko dari setiap kegiatan utama sehingga diharapkan tidak mengganggu pencapaian target kinerja masing-masing yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Banda Aceh, 13 April 2023
Kepala Perwakilan BPKP Aceh,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Supriyadi



**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023
PERWAKILAN BPKP ACEH**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2023	Target Kinerja (TW)				Kegiatan Pengawasan/ Dukungan Manajemen	Risiko Utama (Nilai Risiko)	Anggaran Pengawasan	Anggaran Alat Tulis Kantor	PIC Eselon III	Satuan	Target Kegiatan (TW)				
				I	II	III	IV							I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1 Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi	Rp (Juta)	383	-	-	-	383	Pengawasan atas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD)	Hasil Kegiatan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan) tidak dapat ditindaklanjuti	16	20.190.344,00	2.243.372,00	Korwas JFA Bidang APD 1 dan APD 2	LHP	-	5	-	-
	1.2 Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah																	
	1.2.1 Nilai Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah	Rp (Juta)	134.261	-	-	-	134.261	Audit Tujuan Tertentu, Evaluasi, Monitoring, Reviu	Anggaran pengawasan (assurance dan consulting) belum sesuai kebutuhan	17	357.278.457,00	40.595.113,00	Korwas JFA Bidang APD 1 dan APD 2	LHP	8	14	12	10
	1.2.2 Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara	Rp (Juta)	2.000	-	-	-	2.000	Audit Tujuan Tertentu, Evaluasi, Monitoring, Reviu	Anggaran pengawasan (assurance dan consulting) belum sesuai kebutuhan	17	827.882.628,00	92.320.801,00	Korwas JFA Bidang IPP	LHP	15	23	25	21
	1.2.3 Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara	Rp (Juta)	-	-	-	-	-	Audit Tujuan Tertentu, Evaluasi, Monitoring, Reviu	Anggaran pengawasan (assurance dan consulting) belum sesuai kebutuhan	17	114.380.600,00	13.482.587,00	Korwas JFA Bidang Akuntan Negara	LHP	5	1	4	1
	1.3 Nilai penyelamatan keuangan Negara	Rp (Juta)	56.684	-	-	-	56.684	Audit Investigasi (AI), Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), Pemberian Keterangan Ahli (PKA)	Kualitas barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi teknis/kuantitas pada kontrak	22			Korwas JFA Bidang Investigasi	LHP	-	-	-	-
Jumlah Anggaran Sasaran Kegiatan 1										1.319.732.029,00	148.641.873,00							
2 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2.1 Jumlah PSN yang tercapai sesuai target																	
	2.1.1 Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	PSN	2	-	-	-	2	Pengawasan atas Proyek Strategis Nasional	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP	20	216.239.905,00	24.027.674,00	Korwas JFA Bidang IPP	LHP	3	16	9	15
	2.1.2 Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	PSN	1	-	-	-	1	Pengawasan atas Proyek Strategis Nasional	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP	20	95.278.600,00	10.586.923,00	Korwas JFA Bidang Akuntan Negara	LHP	4	6	4	4
	2.2 Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen (%)	85	-	-	-	85	Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan	Rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan tidak komprehensif/holistis	17			Korwas JFA Bidang Investigasi	LHP	-	-	-	-
	2.3 Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Persen (%)	1	-	-	-	1	APPD - Evaluasi atas Peran UMKM sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Aceh	Hasil Kegiatan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan) tidak dapat ditindaklanjuti	16	107.100.000,00	15.300.000,00	Korwas JFA Bidang Investigasi	LHP	-	4	-	-
Jumlah Anggaran Sasaran Kegiatan 2										418.618.505,00	49.914.597,00							
3 Meningkatkan Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	3.1 Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	Persen (%)	80	-	-	-	80	Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan tidak komprehensif/holistis	17			Korwas JFA Bidang Investigasi	LHP	-	-	-	-
Jumlah Anggaran Sasaran Kegiatan 3										-	-							
4 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	4.1 Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	7	-	-	-	7	Pengawasan atas Akuntabilitas Tata Kelola BUMD BPD, Jasa Air dan Aneka Usaha	Tim gagal memperoleh data yang dibutuhkan	13	230.030.578,00	25.560.097,00	Korwas JFA Bidang Akuntan Negara	LHP	-	25	-	-
	4.2 Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	3	-	-	-	3	Pengawasan terhadap Akuntabilitas Tata Kelola BLU dan BLUD	SDM yang ada belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan	11	52.564.666,00	5.840.667,00	Korwas JFA Bidang Akuntan Negara	LHP	-	5	-	-
	4.3 Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	400	-	-	-	400	Pengawasan atas Akuntabilitas dan Tata Kelola Keuangan BUMDes	Tim yang akan ditugaskan tidak tersedia	16	9.133.556,00	1.014.889,00	Korwas JFA Bidang Akuntan Negara	LHP	-	-	1	-
	4.4 Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	2	-	-	-	2	Pengawasan atas Akuntabilitas dan Tata Kelola Keuangan BUMDes	Hasil Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) tidak diimplementasikan oleh mitra kerja (stakeholder)	11								
Jumlah Anggaran Sasaran Kegiatan 4										291.728.800,00	32.415.653,00							

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023

PERWAKILAN BPKP ACEH

Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Satuan (3)	Target Kinerja 2023 (4)	Target Kinerja (TW)				Kegiatan Pengawasan/ Dukungan Manajemen (9)	Risiko Utama (Nilai Risiko) (10)	Anggaran Pengawasan (11)	Anggaran Alat Tulis Kantor (12)	PIC Eselon III (13)	Satuan (14)	Target Kegiatan (TW)									
				I (5)	II (6)	III (7)	IV (8)							I (15)	II (16)	III (17)	IV (18)						
7 Meningkatkan Tata Kelola Unit Kerja	7.1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75	-	-	-	75	Penilaian Mandiri (Self Assessment) dan Evaluasi Penerapan Zona Integritas	Dokumentasi Pemenuhan ZI tidak lengkap	14	25.058.887.000,00	Kabag Umum	Laporan				1						
	7.2 Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82	-	-	-	82	Penilaian Mandiri (Self Assessment) dan Evaluasi Penerapan SAKIP	Dokumentasi pemenuhan evaluasi SAKIP tidak lengkap	7		Korwas JFA Bidang P3A	Laporan				1						
	7.3 Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	Persen (%)	70	-	-	-	70	Laporan MRI Triwulan	Tidak dilakukan pendokumentasian, pemantauan, dan pengukuran perkembangan/progres penyelenggaraan SPIP	17		Kabag Umum	Laporan	1	1	1	1						
	7.4 Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen (%)	100	100	100	100	100	Laporan MRI Triwulan	Terlambatnya penyelesaian Rencana Tindak Pengendalian yang telah direncanakan dan disepakati Pemilik Risiko	7		Korwas JFA Bidang P3A	Laporan	1	1	1	1						
	7.5 Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75	-	-	-	75	Survei Kepuasan kepada para stakeholders BPKP Aceh	SDM yang ada belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan	11		Kabag Umum	Laporan		1		1						
	7.6 Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95	95	95	95	95	Monitoring Pelaksanaan Anggaran	Revisi anggaran terlalu sering	16		Kabag Umum	Laporan	1	1	1	1						
	7.7 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80	-	-	-	80	Penghapusan BMN rusak berat, Pelaporan Belanja Modal, Rekonsiliasi BMN, Updating Kondisi BMN	Sarana dan Prasarana kurang memadai untuk menunjang kegiatan pengawasan dan operasional	16		Kabag Umum	Laporan	1	1	1	1						
Jumlah Anggaran Tata Kelola Unit Kerja																							
Jumlah Total Anggaran																							
											25.058.887.000,00												
											29.102.909.000,00												

Banda Aceh, 13 April 2023

Kepala Perwakilan

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Supriyadi



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN ACEH**

Jalan Tgk. Panglima Nyak Makam, Banda Aceh 23118
Telepon (0651) 28133, 28134 dan 28183, Faks. 28173